



MEMBANGUN PENDIDIKAN BERKEADILAN: MENGATASI MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ANTARA DAERAH DAN PERKOTAAN

Tanti Nurmalia Sari^{1*}, Jasiah²

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email : tanti2410130413pasca@iain-palangkaraya.ac.id¹, jasiah@iain-palangkaraya.ac.id²

Article Info	Abstrak
Submitted: 08-04-2025	Ketimpangan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terluar, terpencil), terus terjadi akibat kesenjangan infrastruktur, distribusi guru, dan akses teknologi. Studi ini bertujuan mengidentifikasi celah sistemik dan menawarkan solusi terintegrasi melalui evaluasi kebijakan, inovasi teknologi, dan kolaborasi multisektoral. Pendekatan campuran (studi literatur), pemetaan GIS, dan studi kasus kualitatif di daerah 3T. Masalah utama meliputi implementasi kebijakan yang tidak efektif dan kurangnya teknologi adaptif. Solusi mencakup alat digital <i>offline</i> , model insentif guru, dan program pendidikan berbasis masyarakat. Penelitian mendorong desentralisasi kebijakan, kemitraan publik-swasta, dan pemerataan berbasis teknologi sebagai kerangka mengurangi kesenjangan sosioekonomi jangka panjang.
Final Revised: 18-04-2025	
Accepted: 19-04-2025	
Published: 22-04-2025	

Kata Kunci: Pemerataan Pendidikan; Sarana dan Prasarana Pendidikan; Kualitas Pendidikan

Abstract

Educational inequality in Indonesia, especially in 3T (disadvantaged, outermost, remote) areas, continues to occur due to gaps in infrastructure, teacher distribution, and access to technology. The study aims to identify systemic gaps and offer integrated solutions through policy evaluation, technological innovation, and multisectoral collaboration. Mixed approach (literature study), GIS mapping, and qualitative case studies in 3T areas. Key issues include ineffective policy implementation and a lack of adaptive technologies. Solutions include offline digital tools, teacher incentive models, and community-based education programs. Research promotes policy decentralization, public-private partnerships, and technology-based equity to reduce long-term socioeconomic disparities.

Keywords: *Equitable Distribution of Education, Educational Facilities and Infrastructure; Quality of Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar utama bangsa, hanya ketika sistem pendidikannya berkualitas tinggi dan diatur dengan benar, bangsa akan maju (Muvid, 2022). Pendidikan adalah hal asasi setiap individu dan merupakan pilar utama pembangunan suatu negara (Ariska Putri, 2024; Doriza et al., 2012; Lutfiani & Yuniasih, 2021). Pendidikan bukan satu-satunya bidang yang dapat membantu memajukan bangsa. Namun, pendidikan dianggap sebagai salah satu bidang terpenting dan utama yang berkontribusi pada kemajuan bangsa. Ingatlah bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk, menumbuhkan, dan menggali berbagai potensi siswa sebagai generasi berikutnya dari bangsa ini. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing di seluruh dunia. Tidak peduli

seberapa maju ekonomi, politik, dan pendapatan belanja suatu negara, jika warganya tidak mencapai kemajuan dalam pendidikan bangsa tersebut akan goyah atau bahkan hancur.

Pemerataan pendidikan adalah isu yang sangat kompleks yang masih menjadi tantangan besar di negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pemerataan pendidikan menjadi tantangan penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan masih terjadi, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Dalam konteks tersebut, artikel ini akan membahas beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan pendidikan di Indonesia.

Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak peserta didik khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam suatu lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Akses pendidikan yang tidak merata berarti banyak anak tidak dapat bersekolah atau harus menempuh jarak jauh. Kualitas pendidikan bervariasi dengan daerah perkotaan sering kali memiliki fasilitas dan guru yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil. Akibatnya, hasil pendidikan juga tidak setimbang, mempengaruhi prestasi akademik dan peluang masa depan peserta didik. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika peserta didik memperoleh kesempatan belajar pada tingkat SD sampai SMA, maka peserta didik memiliki bekal dasar untuk dapat mengikuti perkembangan kemajuan zaman melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia (Patandung & Panggua, 2022). Dengan demikian peserta didik tidak menjadi terbelakang (penghambat pembangunan), tetapi menjadi pionir dalam pendidikan.

Tidak adanya kesetaraan dalam pendidikan menghambat pembangunan infrastruktur dan kesetaraan tenaga pendidik. Tenaga pendidik lebih banyak tersebar diperkotaan dari pada di pedesaan, sehingga sumber daya pengajar banyak berada di perkotaan (Rosmana et al., 2022). Hal ini mengakibatkan kekurangan guru yang terjadi di daerah pedesaan, lantaran tidak meratanya pembagian tenaga pendidik. Selain itu, infrastruktur di wilayah 3T (terluar, tertinggal dan terpencil) sangat buruk dan perlunya peningkatan pelayanan. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan keadaan diperkotaan, khususnya di daerah Kalimantan. Dengan demikian keadaan tersebut menjadi factor utama bagi para pendidik untuk enggan ditempatkan atau ditugaskan di daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini yakni mengidentifikasi masalah pemerataan pendidikan di Indonesia, menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan dalam Pendidikan serta menawarkan solusi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menonjol dengan pendekatan multisektoral untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah 3T, menggabungkan teknologi, evaluasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat—aspek yang belum diteliti secara mendalam dalam studi sebelumnya seperti (Rosmana et al., 2022). Uniknya, penelitian ini mengusulkan inovasi teknologi rendah biaya (misal: modul digital offline) untuk daerah tanpa internet, suatu celah yang diidentifikasi Dian tetapi belum diuji secara sistematis. Selain itu, penelitian menekankan kolaborasi lintas sektor (contoh: sinergi pendidikan-Kesehatan) dan pemetaan berbasis GIS untuk distribusi sumber daya, melampaui solusi berbasis guru seperti program SM-3T (Aprilla, 2020; Rahman et al., 2023; Saputra, 2018, 2021). Studi ini juga mengkritisi dampak jangka panjang ketimpangan (misal: migrasi, radikalasi), dimensi yang kurang dieksplorasi dalam literatur.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai sumber data yang relevan dari literatur yang sudah ada. Studi literatur melibatkan penelusuran terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan temuan yang telah ada, sehingga peneliti dapat

mengidentifikasi celah penelitian, menemukan pola dan tren, serta mengembangkan kerangka konseptual yang mendukung penelitian yang dilakukan. Melalui studi literatur, peneliti juga dapat membandingkan berbagai perspektif dan memperoleh data sekunder yang dapat memperkaya analisis serta memberikan landasan teori yang kuat bagi hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pendidikan adalah proses membangun manusia menjadi individu yang memahami peran dan fungsinya (Muvid, 2022). Bukan menjadi manusia yang “liar” yang menyimpang dari kodratnya dan mengabaikan tugasnya sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa. Pendidikan adalah proses yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia untuk menjadi individu yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan (Afifah et al., 2021; Mutia Nur Putri et al., 2023; Siregar & dkk, 2023; Syah Rani Maha, 2023). Pendidikan membantu manusia memahami fungsi dan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Dengan memahami peran sebagai makhluk yang berakal dan beradab, manusia yang terdidik mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya, menjaga keseimbangan alam, serta menghindari perilaku destruktif yang dapat menimbulkan konflik atau kerusakan di bumi.

Individu yang terdidik dan memiliki karakter mulia diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menciptakan generasi emas yang berkomitmen pada persatuan dan kesatuan bangsa (Ananda, 2017). Generasi ini adalah generasi yang tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan bersama, mereka akan memilih untuk menyatukan daripada memecah belah, serta mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri. Komitmen untuk membangun bangsa tercermin dalam sikap saling menghargai, bekerja sama dan mengarahkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara moral yang menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan dan ketahanan suatu bangsa.

Coleman dalam bukunya mengemukakan dua konsep pemerataan yaitu pemerataan aktif dan pasif (Muqsith, 2020). Pemerataan pasif lebih menekankan pada kesempatan yang sama untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif berarti bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan untuk mencapai hasil belajar terbaik mereka. Menurut pemahaman ini, pemerataan pendidikan berarti tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga persamaan dalam perlakuan setelah menjadi siswa agar mereka dapat memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Konsep pemerataan aktif yang dikemukakan Coleman seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah saat membuat kebijakan atau mensinkronisasi kebijakan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam mengatasi rata-rata pendidikan orang Indonesia yang saat ini masih rendah dan masih banyak ditemui di setiap provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan langsung antara pemerataan disektor pendidikan dan indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penulis berpendapat bahwa beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan di daerah terpencil, dapat menyebabkan ketidaksamaan. Hal ini menyebabkan komunikasi terputus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, lembaga pendidikan kurang diberdayakan untuk melaksanakan proses pendidikan yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan. Hal ini mungkin terjadi jika pemerintah pusat dan daerah tidak mengontrol pendidikan di daerah terpencil. Oleh karena itu, mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak akan menerima pendidikan yang diharapkan.

Kedua, masalah pemerataan pendidikan terkait erat dengan ketidaksesuaian program kerja antar instansi pemerintah/lembaga pemerintah. Oleh karena itu, program harus segera

diselaraskan tetapi harus diawasi oleh Bappenas RI, yang bertanggung jawab atas sektor tersebut. Ketiga, mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan yang disebabkan oleh terbatasnya sekolah dan sarana belajar di desa-desa terpencil.

Di Indonesia, sistem pendidikan selalu disesuaikan dengan politik dan birokrasi yang ada. Namun ini bukanlah masalah utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih penting adalah bagaimana sistem dilaksanakan di lapangan, termasuk ketidaksamaan pendidikan terutama di daerah tertinggal. Masalah pemerataan pendidikan di Indonesia sangat rumit. Setiap kali terjadi perubahan kebijakan, kurikulum dan sistem pendidikan pun seringkali diadaptasi agar sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang berkuasa. Meskipun demikian, tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan bukan terletak pada perubahan sistem yang bersifat administrative, melainkan pada implementasinya di lapangan. Salah satu masalah terbesar adalah ketidaksamaan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, yang masih jauh dari standar yang ada di perkotaan. Ketidakmerataan akses pendidikan di wilayah yang terpencil masih menjadi kendala yang besar terutama dalam hal kualitas sarana dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada kebijakan, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten di lapangan.

Ketidakmerataan pendidikan ini terjadi dikalangan masyarakat miskin Indonesia. Bagi banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, pendidikan tidak selalu menjadi prioritas utama. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan yang dianggap lebih mendesak untuk dipenuhi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan memiliki tingkat pendapatan yang rendah seringkali menjadi penghambat akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Faktor-faktor yang berkaitan dengan uang dan keuangan bertanggung jawab atas ketidakmerataan ini. Biaya yang dikeluarkan oleh seorang sebanding dengan tingkat pendidikan mereka, dimana keluarga miskin sering kali tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun pemerintah telah memberlakukan kebijakan pendidikan gratis di beberapa tingkatan, masih ada biaya tambahan seperti seragam, buku, alat tulis dan kegiatan ekstrakurikuler yang memberatkan keluarga kurang mampu.

Sebagai negara berkembang, sebagian besar penduduknya hidup pada taraf berkecukupan yang mempengaruhi prioritas mereka terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang merasa bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan tidak sebanding dengan manfaat jangka pendek yang mereka rasakan, terutama jika pendidikan tersebut tidak menjamin pekerjaan yang layak bagi anak-anak mereka di masa depan. Biaya pendidikan di Indonesia yang relative tinggi telah menjadi salah satu factor yang menyebabkan banyak keluarga lebih memilih fokus pada kebutuhan dasar yang dibandingkan dengan Pendidikan (Afrilianinta et al., 2023; Arsal & Hidayat, 2024; Mulyana, 2018). Hal ini menjadi dilema, di mana pendidikan yang dianggap sebagai investasi masa depan sering kali harus berhadapan dengan realitas ekonomi yang mendesak, sehingga pemerataan akses pendidikan yang berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan.

Selain itu, ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia menyebabkan distribusi tenaga pendidik dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Guru lebih banyak tersebar di perkotaan dibandingkan di pedesaan, sehingga daerah terpencil, khususnya wilayah 3T (terluar, tertinggal, terpencil) mengalami kekurangan tenaga pengajar. Wilayah perkotaan cenderung memiliki konsentrasi guru yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan terpencil. Hal ini mengakibatkan wilayah 3T (terluar, tertinggal, terpencil) mengalami kekuarangan tenaga penagajar yang signifikan. Guru-guru yang bertugas di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan, pengembangan professional, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Sebaliknya, di daerah terpencil jumlah guru tidak mencukupi dan seringkali mereka harus menangani jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas normal, mengakibatkan proses belajar mengajar yang tidak optimal.

Ketidaksetimbangan distribusi tenaga pendidik ini berdampak pada kualitas pendidikan di wilayah 3T yang cenderung lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Kualitas pengajaran di daerah tersebut seringkali tidak sebanding karena kurangnya jumlah guru yang memiliki kompetensi sesuai standar. Guru-guru di wilayah 3T juga kerap kali menghadapi tantangan dalam memperoleh pelatihan lanjutan atau akses terhadap materi ajar yang lebih Mutakhir, sehingga perkembangan profesional mereka tertinggal. Kondisi ini memperparah ketimpangan dalam hasil belajar peserta didik di antara daerah perkotaan dan perdesaan yang berdampak pada kesempatan anak-anak di wilayah 3T untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Wilayah 3T memiliki tantangan yang kompleks, termasuk aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur yang minim, serta masalah sosial-ekonomi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Infrastruktur pendidikan di wilayah ini sering kali jauh tertinggal dibandingkan dengan perkotaan, mulai dari bangunan sekolah yang kurang layak, fasilitas pendukung terbatas, hingga akses teknologi yang minim. Banyak guru yang enggan ditempatkan di wilayah 3T karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, sulitnya akses transportasi serta kurangnya dukungan teknologi yang memadai untuk proses belajar mengajar. Tantangan-tantangan ini menyebabkan proses pendidikan di wilayah 3T sulit berkembang, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi ketimpangan tersebut dan menciptakan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dampak yang sangat signifikan pada masalah pendidikan antara lain.

a. Individu:

1. Peluang ekonomi terbatas: Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki peluang kerja yang lebih sedikit dan gaji yang lebih rendah. Hal ini diartikan individu dengan tingkat pendidikan yang rendah sering menghadapi keterbatasan dalam peluang ekonomi karena mereka umumnya tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi atau posisi yang memerlukan keahlian khusus. Akibatnya, mereka lebih mungkin bekerja disektor-sektor dengan upah rendah dan kurang stabil, yang membatasi potensi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai keamanan finansial. Rendahnya tingkat pendidikan juga dapat membatasi akses mereka terhadap pelatihan lebih lanjut atau peluang peningkatan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar kerja semakin kompetitif, sehingga memperkuat siklus keterbatasan ekonomi yang dihadapi.
2. Mobilitas sosial terhambat: Pendidikan salah satu jalan utama untuk meningkatkan status sosial. Ketidakmerataan pendidikan dapat menghambat mobilitas sosial. Hal ini diartikan pendidikan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya, dikarenakan dengan pendidikan yang baik, individu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Namun, Ketika akses terhadap pendidikan tidak merata, individu dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung sering kali kesulitan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, sehingga mobilitas sosial menjadi terhambat. Ketidakmerataan pendidikan memperkuat kesenjangan sosial yang ada, karena tanpa pendidikan yang memadai, mereka yang berada di kelas sosial rendah cenderung tetap berada dalam posisi yang sama tanpa peluang untuk naik ketingkat sosial yang lebih tinggi.

b. Masyarakat :

1. Kesenjangan sosial: Ketidakmerataan pendidikan memperbesar kesenjangan sosial antara kelompok yang berpendidikan tinggi dan rendah.

Hal ini diartikan ketidakmerataan dalam akses dan kualitas pendidikan dapat memperburuk kesenjangan sosial antara kelompok yang berpendidikan tinggi dan rendah. Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi lebih baik biasanya memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, individu dengan pendidikan rendah sering kali terjebak dalam pekerjaan berupah rendah dan sulit untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok yang memiliki pendidikan tinggi dan rendah melebar, yang tidak hanya berdampak pada perbedaan pendapat, tetapi juga pada akses terhadap layanan kesehatan, kesempatan karir, dan partisipasi sosial. Ketidaksetaraan ini memperkuat siklus kemiskinan dan menghambat pembangunan sosial yang inklusif dan merata.

2. Tingkat kemiskinan tinggi: Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Hal ini diartikan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung menghadapi resiko kemiskinan lebih tinggi karena keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan baik. Tanpa pendidikan yang memadai, mereka sering kali hanya memenuhi syarat pekerjaan dengan upah rendah atau pekerjaan informal yang kurang stabil dan tidak memberikan jaminan sosial. Kondisi ini menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan dasar, dan menabung untuk masa depan. Kurangnya pendidikan juga membuat mereka kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin mengutamakan keterampilan dan pengetahuan khusus, sehingga memperburuk kondisi ekonomi dan memperkuat siklus kemiskinan yang sulit di putus.

3. Konflik sosial: Ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dalam akses pendidikan dapat memicu konflik sosial.

Hal ini dimaksudkan ketidakadilan dalam akses pendidikan dapat menjadi sumber ketidakpuasan yang memicu konflik sosial, karena kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak mendapat kesempatan pendidikan yang setara sering kali merasakan ketidakadilan. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas hanya terbuka bagi kelompok tertentu, sedangkan kelompok lainnya terhambat oleh faktor ekonomi, geografis atau kebijakan hal ini memunculkan perasaan ketidakadilan yang dapat memicu kesenjangan sosial. Perasaan tidak puas ini bisa berkembang menjadi protes, demonstrasi/bentrokan. Konflik ini dapat menghambat pembangunan, memecah persatuan masyarakat, dan memperburuk sistem pendidikan yang ada (Fauzan et al., 2022; Novrijayanti et al., 2021).

Pemerintah bersama beberapa organisasi swasta telah berupaya mengurangi kesenjangan di daerah 3T. Solusi tersebut melalui berbagai program kebijakan, antara lain (1) SM-3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, tertinggal, Terpencil), dengan mengirimkan lulusan sarjana untuk mengajar di daerah tersebut guna meningkatkan kualitas pendidikan ; (2) Peningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup penduduk setempat dengan memberikan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik; dan (3) Indonesia Mengajar, sebuah program yang diprakarsai oleh Anies Baswedan, dimana para pengajar muda di kirim ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan pendidikan berkualitas, dan menginspirasi masyarakat. Ketiga program ini adalah bagian dari upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan di daerah, dengan harapan dapat meningkatkan akses pendidikan lebih merata dan memberdayakan masyarakat setempat.

Program “Sarjana Mendidik di daerah 3T” dirancang untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik di wilayah terpencil, khususnya di daerah 3T (terluar, tertinggal,

terpencil). Program ini menargetkan lulusan sarjana yang belum memiliki profesi tetap atau baru memulai karir sebagai calon guru (Febriana, Joko, et al., 2018; Febriana, Nurkamto, et al., 2018; Itasari, 2021). Selama satu tahun, para peserta program ini akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang minim akses pendidikan dengan tujuan utama untuk menambah jumlah guru yang tersedia di daerah tersebut. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para sarjana untuk mengembangkan kemampuan mengajar mereka dalam kondisi yang menantang.

Melalui program ini, para calon guru diharapkan dapat mengasah keterampilan profesional mereka dalam situasi yang jauh berbeda dari perkotaan. Mereka dilatih untuk menjadi pendidik yang profesional, tangguh, mandiri dan mampu bekerja dalam kondisi yang serba terbatas. Pengalaman mengajar di daerah terpencil membantu mereka membangun ketahanan mental dan keterampilan adaptasi yang penting, sekaligus memperdalam pemahaman mereka mengenai tantangan pendidikan di wilayah yang kurang berkembang. Selain itu, calon guru ini didorong untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh peserta didik di daerah terpencil, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Tidak hanya soal kemampuan profesional, program “Sarjana Mendidik di daerah 3T” juga menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan semangat patriotisme. Para peserta didorong untuk melihat pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara Indonesia. Mereka diharapkan memiliki kesadaran yang kuat bahwa mengajar di daerah 3T bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah panggilan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan pendidik yang berkualitas, tetapi juga pendidik yang memiliki komitmen tinggi untuk memajukan pendidikan di seluruh pelosok negeri demi tercapainya cita-cita bangsa dan Makmur.

KESIMPULAN

Pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat ketimpangan sarana-prasarana dan distribusi guru yang tidak merata antara daerah 3T (tertinggal, terluar, terpencil) seperti Kalimantan dengan perkotaan. Minimnya infrastruktur pendidikan, akses teknologi, dan guru berkualitas di daerah terpencil memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran. Solusi yang diperlukan meliputi kebijakan pemerintah yang lebih efektif, insentif untuk guru, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan studi tentang evaluasi kebijakan pendidikan, distribusi guru berbasis insentif, inovasi teknologi rendah biaya, peran swasta melalui CSR, dampak jangka panjang ketimpangan, serta pendekatan multisektoral seperti kolaborasi pendidikan-kesehatan atau pemberdayaan komunitas lokal. Metode seperti penelitian kualitatif mendalam dan pemetaan digital juga dapat memperkuat rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M., Maulidi, A., & Faza, N. (2021). Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Parenting Di Sekolah. *Irfani*, 17(1). <https://doi.org/10.30603/ir.v17i1.2149>
- Afrilianinta, H., Aritonang, J., & Nainggolan, M. (2023). Masalah Biaya Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan (The Problem of Education Costs in Indonesia in the Perspective of Educational Sociology). *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 4.

- Ananda, A. (2017). Demokrasi Pendidikan Pascasarjana dan Generasi Emas Indonesia 2045. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Unsyiah*.
- Aprilla, W. (2020). Masalah Ketidakmerataan Pendidikan Formal di Indonesia. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย*, 4(1).
- Ariska Putri, D. A. (2024). Pengaruh Disparitas Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*, 2(1). <https://doi.org/10.26593/pedr.v2i1.7416>
- Arsal, F. R., & Hidayat, A. (2024). Masalah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kenaikan Biaya Pendidikan. *Invention: Journal Research and Education Studies*. <https://doi.org/10.51178/invention.v5i1.1648>
- Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i1.25>
- Fauzan, F., Doni, I., Kurniawan, R., & Muryali, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.1624>
- Febriana, M., Joko, N., Rochsantiningsih, D., & Anggri Muhtia. (2018). Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Teaching in Rural Indonesian Schools: Teachers' Challenges. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5.
- Febriana, M., Nurkamto, J., Rochsantiningsih, D., & Muhtia, A. (2018). Teaching in Rural Indonesian Schools: Teachers' Challenges. *International Journal of Language Teaching and Education*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/ijolte.v2i2.5002>
- Itasari, E. R. (2021). Program Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Wilayah Perbatasan. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(1).
- Lutfiani, D., & Yuniasih, A. F. (2021). Pengaruh Disparitas Capaian Pendidikan Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2012-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.467>
- Mulyana, S. K. (2018). Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Universitas Andalas*, 5133122001.
- Muqsith, M. A. (2020). IPM dan Cita-Cita Pemerataan Pendidikan. *'ADALAH*, 4(4). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i4.17490>
- Mutia Nur Putri, R., Nulhakim, A., Junaidi Nasution, H., Saputra, R., & Husna, D. U. (2023). Peran Wawasan Pendidikan Karakter Guru PAI dalam Pembentukan Akhlak Mulia Siswa. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2). <https://doi.org/10.58258/jupe.v8i2.5549>
- Muvid, M. B. (2022). Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia. *Widya Balina*, 7(2). <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.153>
- Novrijayanti, I., Astika, Y. W., Sari, M., & Jesika, S. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i2.161>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2).

- Rahman, Z., Saptari, H. A., Darajat, R., Tampubolon, L. G., Yura, A. A. A., Sarasti, & Sarasti, S. A. W. R. (2023). Gagasan Inovasi Pendidikan. In *Paragon Corp* (Vol. 4, Issue April).
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. (2022). Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan Di Daerah 3t. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2).
- Saputra, A. K. (2018). Keterbelakangan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Universitas Andalas*, 5133122001.
- Saputra, A. K. (2021). Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Universitas Andalas*, 2130004.
- Siregar, A. K., & dkk. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Mulia Generasi Muda. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora Vol. 3 No. 1*.
- Syah Rani Maha. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(4).
<https://doi.org/10.31004/jpion.v2i4.176>